



EKONOMI





**Pengaruh PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi, Luas Wilayah Dan
Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal
(Studi Empiris Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Periode 2018-2020)**

*The Effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Economic
Growth, Area and Total Population on Capital Expenditure
(Empirical Study of Regencies/Cities in Central Java Period 2018-2020)*

Dian Afifatusholikhah, Rita Wijayanti, Alfandi Rico Yohanda.
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
Corresponding author: afifahdian12@gmail.com, rw120@ums.ac.id,
alfandirico25@gmail.com

Abstrak

Belanja modal adalah jenis pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan obyek penelitian Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi yang diperoleh dari situs resmi DJPK dan BPS. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Sebanyak 35 sampel data Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Pertumbuhan Ekonomi dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan DAU dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Sumber Daya, Belanja Modal.

Abstract

Capital expenditure is a type of government expenditure in the long term purposed to improving the welfare and quality of life of the community. This study purposes to determine the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, economic growth, area and population on capital expenditures. This study uses a quantitative approach with the object of research is regencies/cities in Central Java. The data used is secondary data collected by the documentation method obtained from the official website of DJPK and BPS. The sampling technique used was saturated sampling technique. A total of 35 samples of regencies/city in Central Java were processed using multiple linear regression analysis. This research shows that regional original income, economic growth and area have an effect on capital expenditure. But general allocation funds and total population haven't an effect on capital expenditure.

Keywords : Regional Original Income, General Allocation Funds, Economic Growth, Resources, Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang sekarang desentralisasi memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala kebutuhannya. Dengan adanya sistem desentralisasi maka terbentuklah otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki arti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusannya. Otonomi daerah memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah dalam membuat sebuah kebijakan yang dapat menjadikan



wilayahnya berkembang atau menjadi baik, salah satunya adalah membuat anggaran belanja daerah yang digunakan untuk membeli segala sesuatu yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Belanja modal merupakan belanja yang rutin dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya untuk memperoleh aset tetap guna untuk memperbaiki pelayanan publik dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi modal yang berupa aset tetap (Irman & Purwati 2020). Dengan semakin banyaknya investor dalam menanamkan modalnya pada suatu daerah maka dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak yang dikenakan. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikator keberhasilan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur atau dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Akan tetapi, setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai suatu kegiatan atau proyek pemerintah, yang menyebabkan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat menanggulangi hal tersebut dengan mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pertumbuhan ekonomi daerah juga berperan dalam kemajuan pemerintah daerah. Pemberian kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusannya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena daerah dapat lebih efisien dalam mengelola potensi daerahnya (Wong, 2004). Bahkan daerah yang mempunyai luas wilayah yang kecil dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari daerah yang lebih luas.

Menurut Ardhini (2011) Luas wilayah adalah kesatuan geografis beserta unsur di dalamnya yang memiliki batas dan sistem pemerintahannya. Semakin luas wilayah dari suatu daerah maka dalam proses peningkatan kualitas masyarakat akan memerlukan suatu perhatian yang lebih. Wilayah yang luas selalu berjalan berdampingan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Dengan sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih maka potensi yang ada di dalam suatu wilayah akan terolah dengan optimal. Pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah jika dikelola dengan baik maka akan menciptakan SDM yang bermutu dan berkualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Total populasi adalah 35



kabupaten/kota yang terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2018-2020. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel jenuh dengan menggunakan seluruh obyek penelitian sebagai sampel. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh sampel sebanyak 105 data penelitian dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Setelah dilakukan olah data dihasilkan bahwa PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 menghasilkan rata-rata 26,607695 sedangkan untuk DAU, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk dan belanja modal berturut-turut sebesar 27,571111, 5,0828, 937,1626, 1006905,47 dan 26,486109. Hasil tersebut disajikan dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	25.9119	28.3568	26.607695	0.3949838
DAU	105	26.7557	27.9936	27.571111	0.2822954
Pertumbuhan Ekonomi	105	-7.93	12.65	5.0828	4.17315
Luas Wilayah	105	16.06	2124.47	937.1626	555.32024
Jumlah Penduduk	105	121526	1978759	1006905.47	432728.560
Belanja Modal	105	25.3491	27.8368	26.486109	0.4489105
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data sekunder diolah 2021

Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai asymp sig. sebesar $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan untuk uji multikolinearitas menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD, DAU, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00 sehingga disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selain itu, dilakukan juga uji heteroskedastisitas dengan uji *Spearman rho* yang menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel melebihi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model data tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji autokorelasi dengan metode *Durbin Watson* menghasilkan nilai 1,180. Dengan



berpedoman pada Singgih (2010) yang menyatakan bahwa data lolos uji autokorelasi jika nilai *Durbin Watson* berada di antara -2 sampai 2, yang artinya hasil penelitian ini telah lolos autokorelasi.

Tabel 2 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.079	5	2.816	40.526	.000 ^b
	Residual	6.879	99	0.069		
	Total	20.958	104			

Sumber: Data sekunder diolah 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh PAD, DAU, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk terhadap belanja modal adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $40,526 > F$ tabel 2,31 menandakan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya PAD, DAU, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk secara simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.820 ^a	0.672	0.2635956	

Sumber: Data sekunder diolah 2021

Berdasarkan data di atas, nilai koefisien determinasi dari Adjusted R^2 menunjukkan angka 0,655 yang berarti variabel independen berupa PAD, DAU, pertumbuhan ekonomi, luas wilayah dan jumlah penduduk dapat menjelaskan sebesar 65,5% variabel dependen yaitu belanja modal. Sedangkan 34,5% lainnya, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Analisis Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1 (Constant)	1.868	4.460		0.419	0.676	
PAD	0.689	0.111	0.606	6.230	0	
DAU	0.213	0.172	0.134	1.241	0.218	
Pertumbuhan Ekonomi	0.051	0.007	0.477	7.758	0	
Luas Wilayah	0	0	0.451	4.116	0	
Jumlah Penduduk	-1.92E-04	0	-0.185	-1.442	0.152	

Sumber: Data sekunder diolah 2021



Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi PAD sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi PAD maka dapat memudahkan alokasi belanja modal yang berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Meianto dkk (2012) dan Devita dkk (2014).

Sedangkan untuk variabel DAU menghasilkan nilai signifikansi $0,218 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widiasmara (2019), Sholikhah, dkk (2014), Ayem dan Pratama (2018) dan Meianto dkk (2012). DAU adalah dana yang dialokasikan dari APBN, sehingga seberapa besar jumlah DAU yang dialokasikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal karena bergantung terhadap pengelolaan potensi daerah itu sendiri.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi menghasilkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taiwo & Abayomi (2011) dan Ayem dan Pratama (2018).

Untuk variabel luas wilayah menghasilkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Semakin luas suatu wilayah maka semakin tinggi potensi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD yang dapat memudahkan alokasi belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meianto dkk (2012).

Sedangkan untuk jumlah penduduk menghasilkan nilai signifikansi $0,152 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devita dkk (2014) dan Afifanda (2014). Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak dana yang dibutuhkan dalam alokasi belanja modal daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa dengan adanya sistem desentralisasi akan memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam mengatur daerahnya sendiri salah satunya alokasi belanja modal. Belanja modal merupakan belanja yang rutin dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya untuk memperoleh aset tetap guna untuk memperbaiki pelayanan publik dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PAD, pertumbuhan ekonomi dan luas wilayah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan untuk DAU dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

Afifanda, D. (2017). *Pengaruh dana alokasi umum, jumlah penduduk, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di kabupaten kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah*.



- Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)*. Skripsi, Univeritas Diponegoo, Semarang.
- Ayem, S., & Pratama, D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Akuntansi Dewantara*, 2 (2), 169–182.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.
- Irman, M., & Purwati, A. A. (2020). Analysis On The Influence Of Current Ratio, Debt to Equity Ratio and Total Asset Turnover Toward Return On Assets On The Otomotive and Component Company That Has Been Registered In Indonesia Stock Exchange Within 2011-2017. *Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 1(1), 36-44.
- Meianto, E., Betri, B., & Dhia Wenny, C. (2012). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Santoso, Singgih. (2010). *Statistik Multivariat*. Jakarta: Gramedia
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taiwo, Muritala and Taiwo Abayomi. (2011). Government Expenditure and Economic Development. *European Journal of Business and Management*, 3(9).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 45-56.
- Wong, John D. (2004). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*.